

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Pandi, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watampone
selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Drs. H. Zein Ahsan, M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Watampone, 1 Nopember 2017

Pihak Kedua,

Drs. H. Zein Ahsan, M.H.
NIP. 19550826 198203 1 004



Pihak Pertama,

Drs. H. Pandi, S.H.,M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Unit Kerja : Pengadilan Agama Watampone

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 95% 99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5	Meningkatnya Kuantitas dan	a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	100%

	Kualitas Pengawasan	b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
		d. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya Transparansi Peradilan	a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	50%
		b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	90%
7	Terwujudnya Tertib Administrasi Sekretariat	a. Persentase kearsipan surat	90%
		b. Persentase pencatatan barang persediaan	90%
		c. Persentase pencatatan barang inventaris	90%
		d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	90%
		e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	90%
		f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	90%
		g. Persentase kelengkapan data pegawai	90%
		h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	90%
		i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	90%
		j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	90%
		k. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	90%
		l. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	90%
		m. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	90%
		n. Persentase arsip Laporan Tahunan	90%
		o. Persentase arsip Dokumen SAKIP	90%
		p. Persentase Dokumen Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran berikutnya tepat waktu	90%
		q. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu	90%
8	Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang	a. Persentase pembayaran gaji	90%
		b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	90%

9	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan	a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA dan Perencanaan	90%
		b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai.	90%

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan BUA | Rp. 7.110.057.000 |
| 2. Pengadaan Sarana & Prasarana | Rp. 230.000.000 |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. 146.660.000 |

Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Zein Ahsan, M.H.
NIP. 19550826 198203 1 004

Watampone, 1 Nopember 2017
Ketua
Pengadilan Agama Watampone,



Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033